



PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI NATUNA,

- Menimbang** : bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati Natuna tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);

5. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4389);
10. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
13. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

14. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 5049);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan dan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan dan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

P a s a l 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 terdiri atas :

1. Pendapatan			
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	38.064.524.000,00	
b. Dana Perimbangan	Rp.	1.154.675.272.484,00	
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp.	<u>73.360.203.516,00</u>	
Jumlah Pendapatan			Rp. 1.266.100.000.000,00
2. Belanja			
a. Belanja Tidak Langsung			
1) Belanja Pegawai	Rp.	268.352.046.661,00	
2) Belanja Bunga	Rp.	0,00	
3) Belanja Subsidi	Rp.	43.768.818.621,00	
4) Belanja Hibah	Rp.	41.316.500.000,00	
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	80.155.787.725,00	
6) Belanja Bagi Hasil	Rp.	0,00	
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	38.840.400.000,00	
8) Belanja Tidak Terduga	Rp.	<u>1.000.000.000,00</u>	
			Rp. 473.433.553.007,00
b. Belanja Langsung			
1) Belanja Pegawai	Rp.	91.977.631.000,00	
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	446.192.049.973,00	
3) Belanja Modal	Rp.	<u>354.496.766.020,00</u>	
			Rp. 892.666.446.993,00
Jumlah Belanja			<u>Rp. 1.366.100.000.000,00</u>
Surplus / (Defisit)			Rp. (100.000.000.000,00)
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan	Rp.	100.000.000.000,00	
b. Pengeluaran	Rp.	0,00	
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp.	100.000.000.000,00,	
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan	Rp.		0,00

P a s a l 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

P a s a l 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

P a s a l 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Natuna.

P a s a l 5

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

P a s a l 6

Peraturan Bupati Natuna ini berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2014.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 5 Maret 2014

BUPATI NATUNA

ttd

ILYAS SABL I

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 5 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH

ttd

SYAM SURIZON, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610309 199203 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2014 NOMOR 8

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
RINGKASAN PENJABARAN APBD
Tahun Anggaran 2014

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
4.	PENDAPATAN	
4. 1.	Pendapatan Asli Daerah	38,064,524,000.00
4. 1. 1.	Hasil Pajak Daerah	7,130,000,000.00
4. 1. 1. 01.	Pajak Hotel	150,000,000.00
4. 1. 1. 01. 06.	Hotel bintang satu	150,000,000.00
4. 1. 1. 02.	Pajak Restoran	1,650,000,000.00
4. 1. 1. 02. 01.	Restoran	1,650,000,000.00
4. 1. 1. 03.	Pajak Hiburan	72,000,000.00
4. 1. 1. 03. 02.	Pagelaran kesenian/musik/tari/busana	72,000,000.00
4. 1. 1. 04.	Pajak Reklame	10,000,000.00
4. 1. 1. 04. 01.	Reklame papan/bill board/vidiotron/megatron	10,000,000.00
4. 1. 1. 05.	Pajak Penerangan Jalan	3,150,000,000.00
4. 1. 1. 05. 01.	Pajak penerangan jalan PLN	1,500,000,000.00
4. 1. 1. 05. 02.	Pajak penerangan jalan non PLN	1,650,000,000.00
4. 1. 1. 06.	Pajak Parkir	35,000,000.00
4. 1. 1. 06. 01.	Pajak parkir	35,000,000.00
4. 1. 1. 07.	Pajak Air Tanah	3,000,000.00
4. 1. 1. 07. 01.	Pajak air tanah	3,000,000.00
4. 1. 1. 09.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	500,000,000.00
4. 1. 1. 09. 06.	Tanah timbun	500,000,000.00
4. 1. 1. 10.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	1,500,000,000.00
4. 1. 1. 10. 01.	Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan	1,500,000,000.00
4. 1. 1. 11.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	60,000,000.00
4. 1. 1. 11. 01.	Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	60,000,000.00
4. 1. 2.	Hasil Retribusi Daerah	1,934,524,000.00
4. 1. 2. 01.	Retribusi Jasa Umum	1,600,000,000.00
4. 1. 2. 01. 01.	Retribusi pelayanan kesehatan	1,580,000,000.00
4. 1. 2. 01. 05.	Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum	10,000,000.00
4. 1. 2. 01. 13.	Retribusi pengendalian menara telekomunikasi	10,000,000.00
4. 1. 2. 02.	Retribusi Jasa Usaha	211,000,000.00
4. 1. 2. 02. 09.	Retribusi pelayanan kepelabuhan	66,000,000.00
4. 1. 2. 02. 11.	Retribusi penyeberangan di air	10,000,000.00
4. 1. 2. 02. 16.	Retribusi angkutan bus	135,000,000.00
4. 1. 2. 03.	Retribusi Perizinan Tertentu	123,524,000.00
4. 1. 2. 03. 01.	Retribusi izin mendirikan bangunan	79,824,000.00
4. 1. 2. 03. 03.	Retribusi izin gangguan	7,700,000.00
4. 1. 2. 03. 04.	Retribusi izin trayek	1,000,000.00
4. 1. 2. 03. 05.	Retribusi izin usaha perikanan	35,000,000.00
4. 1. 3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,850,000,000.00
4. 1. 3. 01.	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	3,850,000,000.00
4. 1. 3. 01. 03.	Dividen BUMD	3,850,000,000.00
4. 1. 4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	25,150,000,000.00
4. 1. 4. 02.	Penerimaan Jasa Giro	3,650,000,000.00
4. 1. 4. 02. 01.	Jasa giro kas daerah	3,500,000,000.00
4. 1. 4. 02. 02.	Jasa giro pemegang kas	150,000,000.00
4. 1. 4. 03.	Pendapatan Bunga Deposito	4,500,000,000.00
4. 1. 4. 03. 01.	Rekening deposito pada bank	4,500,000,000.00
4. 1. 4. 15.	Pendapatan BLUD	17,000,000,000.00
4. 1. 4. 15. 01.	Pendapatan BLUD	17,000,000,000.00
4. 2.	Dana Perimbangan	1,154,675,272,484.00
4. 2. 1.	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	890,887,202,484.00
4. 2. 1. 01.	Bagi Hasil Pajak	150,562,807,379.00
4. 2. 1. 01. 01.	Bagi hasil dari pajak bumi dan bangunan	137,000,000,000.00
4. 2. 1. 01. 02.	Bagi hasil dari pajak penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPH pasal 21	8,968,699,379.00
4. 2. 1. 01. 03.	Bagi hasil dari biaya pungut PBB	4,594,108,000.00
4. 2. 1. 02.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	740,324,395,105.00
4. 2. 1. 02. 02.	Bagi hasil dari provisi sumber daya hutan	5,500,000.00
4. 2. 1. 02. 05.	Bagi hasil dari iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (royalti)	6,141,323,000.00
4. 2. 1. 02. 06.	Bagi hasil dari pungutan pengusaha perikanan	311,448,692.00
4. 2. 1. 02. 08.	Bagi hasil dari pertambangan minyak bumi	330,110,316,413.00
4. 2. 1. 02. 09.	Bagi hasil dari pertambangan gas bumi	403,755,807,000.00
4. 2. 2.	Dana Alokasi Umum	187,950,770,000.00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
4. 2. 2. 01.	Dana Alokasi Umum	187,950,770,000.00
4. 2. 2. 01. 01.	Dana alokasi umum	187,950,770,000.00
4. 2. 3.	Dana Alokasi Khusus	75,837,300,000.00
4. 2. 3. 01.	Dana Alokasi Khusus	75,837,300,000.00
4. 2. 3. 01. 01.	DAK pendidikan	10,357,730,000.00
4. 2. 3. 01. 02.	DAK kesehatan	4,531,740,000.00
4. 2. 3. 01. 03.	DAK infrastruktur jalan	21,284,310,000.00
4. 2. 3. 01. 04.	DAK infrastruktur irigasi	4,969,950,000.00
4. 2. 3. 01. 05.	DAK infrastruktur air minum	2,202,420,000.00
4. 2. 3. 01. 06.	DAK infrastruktur sanitasi	2,105,450,000.00
4. 2. 3. 01. 08.	DAK kelautan dan perikanan	4,831,350,000.00
4. 2. 3. 01. 09.	DAK pertanian	3,238,580,000.00
4. 2. 3. 01. 10.	DAK lingkungan hidup	1,339,570,000.00
4. 2. 3. 01. 11.	DAK keluarga berencana	968,950,000.00
4. 2. 3. 01. 12.	DAK kehutanan	1,312,540,000.00
4. 2. 3. 01. 13.	DAK sarana prasarana daerah tertinggal	4,266,580,000.00
4. 2. 3. 01. 15.	DAK keselamatan transportasi darat	409,940,000.00
4. 2. 3. 01. 18.	DAK sarana prasarana kawasan perbatasan	14,018,190,000.00
4. 3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	73,360,203,516.00
4. 3. 3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	35,158,125,308.00
4. 3. 3. 01.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	35,158,125,308.00
4. 3. 3. 01. 01.	Bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor	4,589,401,916.00
4. 3. 3. 01. 02.	Bagi hasil dari bea balik nama kendaraan bermotor	3,652,000,000.00
4. 3. 3. 01. 03.	Bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor	26,577,772,084.00
4. 3. 3. 01. 04.	Bagi hasil dari pajak air permukaan	92,022,000.00
4. 3. 3. 01. 07.	Bagi hasil cukai hasil tembakau	246,929,308.00
4. 3. 4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	14,391,609,000.00
4. 3. 4. 01.	Pendapatan Dana Penyesuaian	14,391,609,000.00
4. 3. 4. 01. 02.	Tambahan penghasilan guru PNSD	2,252,500,000.00
4. 3. 4. 01. 03.	Tunjangan profesi guru PNSD	12,139,109,000.00
4. 3. 5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	23,810,469,208.00
4. 3. 5. 01.	Bantuan Keuangan dari Provinsi	23,810,469,208.00
4. 3. 5. 01. 01.	Bantuan keuangan dari Provinsi lain-lain	23,810,469,208.00
	Jumlah	1,266,100,000,000.00
5.	BELANJA	
5. 1.	Belanja Tidak Langsung	473,433,553,007.00
5. 1. 1.	Belanja Pegawai	268,352,046,661.00
5. 1. 1. 01.	Gaji dan Tunjangan	127,803,056,661.00
5. 1. 1. 01. 01.	Gaji pokok PNS/uang representasi 1)	83,576,988,874.00
5. 1. 1. 01. 02.	Tunjangan keluarga	10,053,949,875.00
5. 1. 1. 01. 03.	Tunjangan jabatan 1)	7,299,701,083.00
5. 1. 1. 01. 04.	Tunjangan fungsional	6,161,656,253.00
5. 1. 1. 01. 06.	Tunjangan beras 1)	7,127,620,905.00
5. 1. 1. 01. 07.	Tunjangan PPh/tunjangan khusus	3,187,917,078.00
5. 1. 1. 01. 08.	Pembulatan gaji	49,827,308.00
5. 1. 1. 01. 09.	Iuran asuransi kesehatan	1,616,585,553.00
5. 1. 1. 01. 10.	Uang paket 2)	38,682,000.00
5. 1. 1. 01. 11.	Tunjangan panitia musyawarah 2)	25,395,300.00
5. 1. 1. 01. 12.	Tunjangan komisi 2)	30,145,500.00
5. 1. 1. 01. 13.	Tunjangan panitia anggaran 2)	16,625,700.00
5. 1. 1. 01. 14.	Tunjangan badan kehormatan 2)	7,125,300.00
5. 1. 1. 01. 15.	Tunjangan alat kelengkapan lainnya 2)	14,798,700.00
5. 1. 1. 01. 16.	Tunjangan perumahan 2)	3,684,000,000.00
5. 1. 1. 01. 17.	Uang duka wafat/tewas 2)	170,000,000.00
5. 1. 1. 01. 18.	Uang jasa pengabdian 2)	166,635,000.00
5. 1. 1. 01. 19.	Belanja penunjang operasional pimpinan DPRD	312,480,000.00
5. 1. 1. 01. 21.	Tunjangan umum	4,262,922,232.00
5. 1. 1. 02.	Tambahan Penghasilan PNS	138,488,990,000.00
5. 1. 1. 02. 01.	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	16,448,231,000.00
5. 1. 1. 02. 02.	Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas	75,915,850,000.00
5. 1. 1. 02. 03.	Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja	25,832,800,000.00
5. 1. 1. 02. 04.	Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi	17,829,109,000.00
5. 1. 1. 02. 06.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	2,463,000,000.00
5. 1. 1. 03.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	1,812,000,000.00
5. 1. 1. 03. 01.	Tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD	1,512,000,000.00
5. 1. 1. 03. 02.	Belanja penunjang operasional KDH/WKDH	300,000,000.00
5. 1. 1. 05.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	150,000,000.00
5. 1. 1. 05. 01.	Insentif pemungutan pajak daerah	150,000,000.00
5. 1. 1. 06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	98,000,000.00
5. 1. 1. 06. 01.	Insentif pemungutan retribusi daerah	98,000,000.00
5. 1. 3.	Belanja Subsidi	43,768,818,621.00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5. 1. 3. 01.	Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga	36,725,730,621.00
5. 1. 3. 01. 01.	Belanja subsidi kepada perusahaan	36,725,730,621.00
5. 1. 3. 02.	Belanja Subsidi kepada Masyarakat/Perorangan	7,043,088,000.00
5. 1. 3. 02. 01.	Belanja subsidi kepada rumah tangga miskin (RTM)	7,043,088,000.00
5. 1. 4.	Belanja Hibah	41,316,500,000.00
5. 1. 4. 01.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	4,770,000,000.00
5. 1. 4. 01. 01.	Pemerintah pusat	4,770,000,000.00
5. 1. 4. 05.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	36,546,500,000.00
5. 1. 4. 05. 01.	Belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi bidang keagamaan	13,862,500,000.00
5. 1. 4. 05. 02.	Belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi bidang kepemudaan dan olah raga	7,300,000,000.00
5. 1. 4. 05. 03.	Belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi bidang kesenian dan kebudayaan	450,000,000.00
5. 1. 4. 05. 04.	Belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi bidang kewanitaan	1,000,000,000.00
5. 1. 4. 05. 05.	Belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi bidang profesi	1,750,000,000.00
5. 1. 4. 05. 07.	Belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi bidang sosial kemasyarakatan	1,500,000,000.00
5. 1. 4. 05. 08.	Belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi bidang pendidikan dan penelitian	10,684,000,000.00
5. 1. 5.	Belanja Bantuan Sosial	80,155,787,725.00
5. 1. 5. 02.	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	55,903,987,725.00
5. 1. 5. 02. 03.	Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat untuk pemberdayaan sosial	22,422,500,000.00
5. 1. 5. 02. 05.	Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan	33,481,487,725.00
5. 1. 5. 03.	Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat	24,251,800,000.00
5. 1. 5. 03. 02.	Belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat untuk perlindungan sosial	3,284,000,000.00
5. 1. 5. 03. 04.	Belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat untuk jaminan sosial	20,967,800,000.00
5. 1. 7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	38,840,400,000.00
5. 1. 7. 03.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	11,900,000,000.00
5. 1. 7. 03. 01.	Belanja bantuan keuangan kepada desa	11,900,000,000.00
5. 1. 7. 04.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa Lainnya	26,430,400,000.00
5. 1. 7. 04. 03.	Belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa	23,930,400,000.00
5. 1. 7. 04. 04.	Belanja Bantuan keuangan kepada pemerintah pusat	2,500,000,000.00
5. 1. 7. 05.	Belanja Bantuan kepada Partai Politik	510,000,000.00
5. 1. 7. 05. 01.	Belanja bantuan kepada partai politik	510,000,000.00
5. 1. 8.	Belanja Tidak Terduga	1,000,000,000.00
5. 1. 8. 01.	Belanja Tidak Terduga	1,000,000,000.00
5. 1. 8. 01. 01.	Belanja tidak terduga	1,000,000,000.00
5. 2.	Belanja Langsung	892,666,446,993.00
5. 2. 1.	Belanja Pegawai	91,977,631,000.00
5. 2. 1. 01.	Honorarium PNS	23,617,711,000.00
5. 2. 1. 01. 01.	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	16,649,470,000.00
5. 2. 1. 01. 05.	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/fasilitator PNS	234,000,000.00
5. 2. 1. 01. 06.	Honorarium petugas/pengawas lapangan/peserta kegiatan	6,734,241,000.00
5. 2. 1. 02.	Honorarium Non PNS	67,295,715,000.00
5. 2. 1. 02. 02.	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	52,634,590,000.00
5. 2. 1. 02. 04.	Honorarium petugas/pengawas lapangan/peserta kegiatan	12,891,675,000.00
5. 2. 1. 02. 05.	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	1,769,450,000.00
5. 2. 1. 03.	Uang Lembur	68,205,000.00
5. 2. 1. 03. 01.	Uang lembur PNS	1,320,000.00
5. 2. 1. 03. 02.	Uang lembur non PNS	66,885,000.00
5. 2. 1. 05.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	96,000,000.00
5. 2. 1. 05. 02.	Uang untuk diberikan kepada pihak masyarakat	96,000,000.00
5. 2. 1. 06.	Belanja Pegawai BLUD	900,000,000.00
5. 2. 1. 06. 01.	Belanja pegawai BLUD	900,000,000.00
5. 2. 2.	Belanja Barang dan Jasa	446,027,849,973.00
5. 2. 2. 01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14,428,815,225.00
5. 2. 2. 01. 01.	Belanja alat tulis kantor	5,771,081,825.00
5. 2. 2. 01. 02.	Belanja dokumentasi/administrasi tender	98,204,000.00
5. 2. 2. 01. 03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battry kering)	426,740,000.00
5. 2. 2. 01. 04.	Belanja perangk, materai, dan benda pos lainnya	1,474,267,400.00
5. 2. 2. 01. 05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1,040,633,000.00
5. 2. 2. 01. 06.	Belanja bahan bakar minyak/gas	4,437,324,000.00
5. 2. 2. 01. 07.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	5,000,000.00
5. 2. 2. 01. 08.	Belanja pengisian tabung gas	2,940,000.00
5. 2. 2. 01. 09.	Belanja spanduk	837,625,000.00
5. 2. 2. 01. 10.	Belanja dekorasi	335,000,000.00
5. 2. 2. 02.	Belanja Bahan/Material	19,492,553,300.00
5. 2. 2. 02. 01.	Belanja bahan baku bangunan	466,800,000.00
5. 2. 2. 02. 02.	Belanja bahan/bibit tanaman	1,875,300,000.00
5. 2. 2. 02. 03.	Belanja bibit ternak	3,853,885,000.00
5. 2. 2. 02. 04.	Belanja bahan obat-obatan	7,020,827,600.00
5. 2. 2. 02. 05.	Belanja bahan kimia	327,312,500.00
5. 2. 2. 02. 06.	Belanja bahan alat-alat olahraga	68,501,000.00
5. 2. 2. 02. 07.	Belanja alat perlengkapan	5,195,640,600.00
5. 2. 2. 02. 08.	Belanja material/hadiah	684,286,600.00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5. 2. 2. 03.	Belanja Jasa Kantor	41,842,257,100.00
5. 2. 2. 03. 01.	Belanja air	438,952,000.00
5. 2. 2. 03. 02.	Belanja telepon	598,992,000.00
5. 2. 2. 03. 03.	Belanja listrik	4,637,264,000.00
5. 2. 2. 03. 05.	Belanja surat kabar/majalah	1,978,400,000.00
5. 2. 2. 03. 06.	Belanja kawat/faksimili/internet	4,628,560,000.00
5. 2. 2. 03. 07.	Belanja paket/pengiriman	1,020,058,000.00
5. 2. 2. 03. 08.	Belanja sertifikasi	150,000,000.00
5. 2. 2. 03. 12.	Belanja jasa penghargaan/prestasi	61,500,000.00
5. 2. 2. 03. 13.	Belanja jasa medis/laboratorium	13,671,609,100.00
5. 2. 2. 03. 14.	Belanja jasa kebersihan	2,403,699,000.00
5. 2. 2. 03. 15.	Belanja jasa kesenian	332,014,000.00
5. 2. 2. 03. 16.	Belanja jasa administrasi	3,500,050,000.00
5. 2. 2. 03. 17.	Belanja jasa publikasi	2,481,159,000.00
5. 2. 2. 03. 18.	Belanja jasa notaris	160,000,000.00
5. 2. 2. 03. 19.	Belanja jasa humas	4,500,000,000.00
5. 2. 2. 03. 21.	Belanja jasa keamanan	950,000,000.00
5. 2. 2. 03. 22.	Belanja perangkat lunak (software)	330,000,000.00
5. 2. 2. 04.	Belanja Premi Asuransi	546,790,000.00
5. 2. 2. 04. 01.	Belanja premi asuransi kesehatan 2)	546,790,000.00
5. 2. 2. 05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12,631,750,000.00
5. 2. 2. 05. 01.	Belanja jasa service	3,451,600,000.00
5. 2. 2. 05. 02.	Belanja penggantian suku cadang	3,888,600,000.00
5. 2. 2. 05. 03.	Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas	4,416,550,000.00
5. 2. 2. 05. 05.	Belanja surat tanda nomor kendaraan	875,000,000.00
5. 2. 2. 06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11,611,789,200.00
5. 2. 2. 06. 01.	Belanja cetak	6,381,736,225.00
5. 2. 2. 06. 02.	Belanja penggandaan	4,672,872,325.00
5. 2. 2. 06. 03.	Belanja dokumentasi	557,180,650.00
5. 2. 2. 07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4,397,972,000.00
5. 2. 2. 07. 01.	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas	420,000,000.00
5. 2. 2. 07. 02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	3,102,672,000.00
5. 2. 2. 07. 03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	871,300,000.00
5. 2. 2. 07. 04.	Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas	4,000,000.00
5. 2. 2. 08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16,659,570,000.00
5. 2. 2. 08. 01.	Belanja sewa sarana mobilitas darat	2,378,770,000.00
5. 2. 2. 08. 02.	Belanja sewa sarana mobilitas air	14,280,800,000.00
5. 2. 2. 10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	475,000,000.00
5. 2. 2. 10. 01.	Belanja sewa meja kursi	22,500,000.00
5. 2. 2. 10. 03.	Belanja sewa proyektor	1,000,000.00
5. 2. 2. 10. 04.	Belanja sewa generator	25,000,000.00
5. 2. 2. 10. 05.	Belanja sewa tenda	191,500,000.00
5. 2. 2. 10. 07.	Belanja sewa peralatan sound sistem	216,000,000.00
5. 2. 2. 10. 08.	Belanja sewa peralatan survey	19,000,000.00
5. 2. 2. 11.	Belanja Makanan dan Minuman	28,623,533,025.00
5. 2. 2. 11. 01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	5,407,944,000.00
5. 2. 2. 11. 02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3,575,457,875.00
5. 2. 2. 11. 03.	Belanja makanan dan minuman tamu	2,802,100,000.00
5. 2. 2. 11. 04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	15,210,879,150.00
5. 2. 2. 11. 05.	Belanja makanan dan minuman pelajar/siswa	1,188,000,000.00
5. 2. 2. 11. 06.	Belanja makanan dan minuman pasien	439,152,000.00
5. 2. 2. 12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	936,844,750.00
5. 2. 2. 12. 01.	Belanja pakaian dinas KDH dan WKDH	17,902,000.00
5. 2. 2. 12. 02.	Belanja pakaian sipil harian (PSH)	71,695,000.00
5. 2. 2. 12. 03.	Belanja pakaian sipil lengkap (PSL)	90,176,000.00
5. 2. 2. 12. 04.	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	96,000,000.00
5. 2. 2. 12. 05.	Belanja pakaian dinas upacara (PDU)	82,000,000.00
5. 2. 2. 12. 06.	Belanja pakaian sipil resmi (PSR)	78,800,000.00
5. 2. 2. 12. 07.	Belanja pakaian dinas lengkap (PDL)	37,655,750.00
5. 2. 2. 12. 08.	Belanja atribut	462,616,000.00
5. 2. 2. 13.	Belanja Pakaian Kerja	311,411,400.00
5. 2. 2. 13. 01.	Belanja pakaian kerja lapangan	311,411,400.00
5. 2. 2. 14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	2,590,172,200.00
5. 2. 2. 14. 01.	Belanja pakaian KORPRI	6,412,200.00
5. 2. 2. 14. 02.	Belanja pakaian adat daerah	106,250,000.00
5. 2. 2. 14. 03.	Belanja pakaian batik tradisional	1,061,800,000.00
5. 2. 2. 14. 04.	Belanja pakaian olahraga	644,490,000.00
5. 2. 2. 14. 05.	Belanja pakaian muslim	24,000,000.00
5. 2. 2. 14. 06.	Belanja pakaian seragam	582,320,000.00
5. 2. 2. 14. 07.	Belanja pakaian kegiatan	164,900,000.00
5. 2. 2. 15.	Belanja Perjalanan Dinas	143,717,401,275.00
5. 2. 2. 15. 01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	54,918,478,275.00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5. 2. 2. 15. 02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	88,798,923,000.00
5. 2. 2. 16.	Belanja Bea Siswa Pendidikan PNS	2,934,000,000.00
5. 2. 2. 16. 01.	Belanja beasiswa tugas belajar D3	640,000,000.00
5. 2. 2. 16. 02.	Belanja beasiswa tugas belajar S1	1,350,000,000.00
5. 2. 2. 16. 03.	Belanja beasiswa tugas belajar S2	590,000,000.00
5. 2. 2. 16. 05.	Belanja beasiswa tugas belajar spesialis	250,000,000.00
5. 2. 2. 16. 06.	Belanja pendidikan PNS ikatan dinas	104,000,000.00
5. 2. 2. 17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	5,372,022,000.00
5. 2. 2. 17. 01.	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	4,366,000,000.00
5. 2. 2. 17. 03.	Belanja kontribusi diklat teknis/fungsional	600,000,000.00
5. 2. 2. 17. 04.	Belanja kontribusi bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, dan lokakarya	80,000,000.00
5. 2. 2. 17. 06.	Belanja kontribusi diklat struktural	326,022,000.00
5. 2. 2. 18.	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	150,000,000.00
5. 2. 2. 18. 01.	Belanja perjalanan pindah tugas dalam daerah	150,000,000.00
5. 2. 2. 20.	Belanja Pemeliharaan	41,855,404,098.00
5. 2. 2. 20. 01.	Belanja pemeliharaan jalan	1,913,573,900.00
5. 2. 2. 20. 02.	Belanja pemeliharaan jembatan	900,000,000.00
5. 2. 2. 20. 03.	Belanja pemeliharaan bangunan	25,442,661,198.00
5. 2. 2. 20. 04.	Belanja pemeliharaan jaringan	5,694,600,000.00
5. 2. 2. 20. 05.	Belanja pemeliharaan peralatan	4,379,575,000.00
5. 2. 2. 20. 07.	Belanja pemeliharaan sistem komputerisasi (software)	695,000,000.00
5. 2. 2. 20. 08.	Belanja pemeliharaan lahan	2,454,994,000.00
5. 2. 2. 20. 09.	Belanja pemeliharaan perlengkapan	375,000,000.00
5. 2. 2. 21.	Belanja Jasa Konsultasi	27,003,359,425.00
5. 2. 2. 21. 01.	Belanja jasa konsultasi penelitian	2,401,670,000.00
5. 2. 2. 21. 02.	Belanja jasa konsultasi perencanaan	12,544,797,292.00
5. 2. 2. 21. 03.	Belanja jasa konsultasi pengawasan	10,552,792,133.00
5. 2. 2. 21. 04.	Belanja jasa konsultasi manajemen	1,125,000,000.00
5. 2. 2. 21. 05.	Belanja jasa konsultasi IT	176,500,000.00
5. 2. 2. 21. 06.	Belanja jasa konsultasi keuangan	95,000,000.00
5. 2. 2. 21. 07.	Belanja jasa konsultasi hukum	107,600,000.00
5. 2. 2. 23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	23,805,328,975.00
5. 2. 2. 23. 01.	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	21,384,328,975.00
5. 2. 2. 23. 02.	Belanja barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga	2,421,000,000.00
5. 2. 2. 25.	Belanja Barang Dana BROS	16,696,996,000.00
5. 2. 2. 25. 01.	Belanja barang BROS	16,696,996,000.00
5. 2. 2. 26.	Belanja Honorarium PNS	7,432,625,000.00
5. 2. 2. 26. 01.	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/fasilitator PNS	7,432,625,000.00
5. 2. 2. 27.	Belanja Honorarium Non PNS	2,848,330,000.00
5. 2. 2. 27. 01.	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	2,848,330,000.00
5. 2. 2. 28.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	18,818,225,000.00
5. 2. 2. 28. 01.	Belanja barang dan jasa BLUD	18,818,225,000.00
5. 2. 2. 29.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	845,700,000.00
5. 2. 2. 29. 02.	Uang untuk diberikan kepada pihak masyarakat	845,700,000.00
5. 2. 3.	Belanja Modal	354,660,966,020.00
5. 2. 3. 01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	7,423,450,000.00
5. 2. 3. 01. 06.	Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan sekolah dasar	3,451,600,000.00
5. 2. 3. 01. 07.	Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan menengah umum dan kejuruan	275,000,000.00
5. 2. 3. 01. 31.	Belanja modal pengadaan tanah fasilitas umum dan sosial	3,696,850,000.00
5. 2. 3. 03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	1,333,400,000.00
5. 2. 3. 03. 05.	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus	424,900,000.00
5. 2. 3. 03. 09.	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up	325,000,000.00
5. 2. 3. 03. 12.	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	583,500,000.00
5. 2. 3. 04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	188,255,000.00
5. 2. 3. 04. 01.	Belanja modal pengadaan gerobak	188,255,000.00
5. 2. 3. 05.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Bermotor	4,000,000,000.00
5. 2. 3. 05. 01.	Belanja modal pengadaan kapal motor	4,000,000,000.00
5. 2. 3. 08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	408,920,000.00
5. 2. 3. 08. 05.	Belanja modal pengadaan mesin generator	188,850,000.00
5. 2. 3. 08. 06.	Belanja modal pengadaan peralatan bengkel	220,070,000.00
5. 2. 3. 09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	445,649,250.00
5. 2. 3. 09. 03.	Belanja modal pengadaan mesin bajak	112,300,000.00
5. 2. 3. 09. 05.	Belanja modal pengadaan mesin potong	49,500,000.00
5. 2. 3. 09. 06.	Belanja modal pengadaan pompa air	201,849,250.00
5. 2. 3. 09. 07.	Belanja modal pengadaan mesin pengolahan	82,000,000.00
5. 2. 3. 10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	716,070,800.00
5. 2. 3. 10. 01.	Belanja modal pengadaan mesin tik	6,000,000.00
5. 2. 3. 10. 02.	Belanja modal pengadaan mesin hitung	26,700,000.00
5. 2. 3. 10. 08.	Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas	104,850,000.00
5. 2. 3. 10. 11.	Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran	2,800,000.00
5. 2. 3. 10. 12.	Belanja modal pengadaan alat pendingin ruangan	425,920,800.00
5. 2. 3. 10. 16.	Belanja modal pengadaan penghisap debu	52,500,000.00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5. 2. 3. 10. 17.	Belanja modal pengadaan papan plang kantor	18,800,000.00
5. 2. 3. 10. 18.	Belanja modal pengadaan teropong	30,000,000.00
5. 2. 3. 10. 20.	Belanja modal pengadaan kipas angin	9,500,000.00
5. 2. 3. 10. 21.	Belanja modal pengadaan TV	39,000,000.00
5. 2. 3. 11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	676,406,000.00
5. 2. 3. 11. 02.	Belanja modal pengadaan almari	435,904,000.00
5. 2. 3. 11. 03.	Belanja modal pengadaan brankas	74,702,000.00
5. 2. 3. 11. 04.	Belanja modal pengadaan filling kabinet	124,900,000.00
5. 2. 3. 11. 07.	Belanja modal pengadaan hiasan ruang kantor	1,000,000.00
5. 2. 3. 11. 08.	Belanja modal pengadaan papan pengumuman	11,500,000.00
5. 2. 3. 11. 11.	Belanja modal pengadaan papan struktur	28,400,000.00
5. 2. 3. 12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2,414,815,800.00
5. 2. 3. 12. 02.	Belanja modal pengadaan komputer/PC	731,616,800.00
5. 2. 3. 12. 03.	Belanja modal pengadaan komputer note book	877,748,000.00
5. 2. 3. 12. 04.	Belanja modal pengadaan printer	361,851,000.00
5. 2. 3. 12. 05.	Belanja modal pengadaan scanner	44,000,000.00
5. 2. 3. 12. 08.	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	75,125,000.00
5. 2. 3. 12. 09.	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flasdisk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	20,000,000.00
5. 2. 3. 12. 10.	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	9,475,000.00
5. 2. 3. 12. 11.	Belanja modal pengadaan software/aplikasi komputer	295,000,000.00
5. 2. 3. 13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	2,184,678,600.00
5. 2. 3. 13. 01.	Belanja modal pengadaan meja kerja	465,496,200.00
5. 2. 3. 13. 02.	Belanja modal pengadaan meja rapat	44,012,000.00
5. 2. 3. 13. 04.	Belanja modal pengadaan kursi kerja	479,595,000.00
5. 2. 3. 13. 05.	Belanja modal pengadaan kursi rapat	287,102,000.00
5. 2. 3. 13. 07.	Belanja modal pengadaan tempat tidur	2,000,000.00
5. 2. 3. 13. 08.	Belanja modal pengadaan sofa	23,000,000.00
5. 2. 3. 13. 09.	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	369,500,000.00
5. 2. 3. 13. 10.	Belanja modal pengadaan kursi sekolah	148,166,200.00
5. 2. 3. 13. 11.	Belanja modal pengadaan meja sekolah	245,587,200.00
5. 2. 3. 13. 12.	Belanja modal pengadaan meja resepsionis	65,500,000.00
5. 2. 3. 13. 13.	Belanja modal pengadaan kursi tunggu	54,720,000.00
5. 2. 3. 14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	21,300,000.00
5. 2. 3. 14. 04.	Belanja modal pengadaan dispenser	14,000,000.00
5. 2. 3. 14. 05.	Belanja modal pengadaan kulkas	7,300,000.00
5. 2. 3. 15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	1,028,500,000.00
5. 2. 3. 15. 03.	Belanja modal pengadaan karpet	1,010,000,000.00
5. 2. 3. 15. 04.	Belanja modal pengadaan gorden/tirai	18,500,000.00
5. 2. 3. 16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	561,104,000.00
5. 2. 3. 16. 01.	Belanja modal pengadaan kamera	109,000,000.00
5. 2. 3. 16. 02.	Belanja modal pengadaan handycam	48,104,000.00
5. 2. 3. 16. 03.	Belanja modal pengadaan proyektor	179,000,000.00
5. 2. 3. 16. 04.	Belanja modal pengadaan tape	7,000,000.00
5. 2. 3. 16. 05.	Belanja modal pengadaan sound system	203,500,000.00
5. 2. 3. 16. 06.	Belanja modal pengadaan alat perekam	6,000,000.00
5. 2. 3. 16. 07.	Belanja modal pengadaan megaphone	8,500,000.00
5. 2. 3. 17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	567,250,000.00
5. 2. 3. 17. 04.	Belanja modal pengadaan radio HF/FM (handy talkie)	332,250,000.00
5. 2. 3. 17. 06.	Belanja modal pengadaan radio UHF	35,000,000.00
5. 2. 3. 17. 07.	Belanja modal pengadaan alat sandi	200,000,000.00
5. 2. 3. 18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	1,725,205,000.00
5. 2. 3. 18. 04.	Belanja modal pengadaan alat GPS	85,000,000.00
5. 2. 3. 18. 05.	Belanja modal pengadaan kompas/peralatan navigasi	1,640,205,000.00
5. 2. 3. 19.	Belanja Modal pengadaan Alat-alat Kedokteran	13,880,449,500.00
5. 2. 3. 19. 01.	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum	8,129,371,500.00
5. 2. 3. 19. 07.	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan	428,488,500.00
5. 2. 3. 19. 14.	Belanja modal pengadaan alat-alat penyakit dalam/internis	5,322,589,500.00
5. 2. 3. 20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	4,264,767,050.00
5. 2. 3. 20. 07.	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium perikanan	90,000,000.00
5. 2. 3. 20. 08.	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium bahasa	426,000,000.00
5. 2. 3. 20. 10.	Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah	3,748,767,050.00
5. 2. 3. 21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	71,155,237,100.00
5. 2. 3. 21. 04.	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan lapis hotmix	37,829,210,700.00
5. 2. 3. 21. 06.	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan beton bertulang	16,317,796,400.00
5. 2. 3. 21. 07.	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan semen	14,427,680,000.00
5. 2. 3. 21. 08.	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan tanah	2,580,550,000.00
5. 2. 3. 22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	9,551,731,000.00
5. 2. 3. 22. 04.	Belanja modal pengadaan konstruksi penyebrangan diatas air	9,551,731,000.00
5. 2. 3. 23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	24,480,913,100.00
5. 2. 3. 23. 05.	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi	5,264,710,100.00
5. 2. 3. 23. 06.	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	8,885,603,000.00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5. 2. 3. 23. 10.	Belanja modal pengadaan konstruksi drainase	6,330,600,000.00
5. 2. 3. 23. 13.	Belanja modal pengadaan konstruksi instalasi jaringan air	4,000,000,000.00
5. 2. 3. 24.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan jalan, Taman dan Hutan Kota	700,000,000.00
5. 2. 3. 24. 04.	Belanja modal pengadaan lampu penerangan jalan	700,000,000.00
5. 2. 3. 25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	15,005,831,000.00
5. 2. 3. 25. 01.	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	5,690,831,000.00
5. 2. 3. 25. 02.	Belanja modal pengadaan instalasi telepon	100,000,000.00
5. 2. 3. 25. 03.	Belanja modal pengadaan pembangkit listrik	9,215,000,000.00
5. 2. 3. 26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	183,607,238,420.00
5. 2. 3. 26. 01.	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	39,352,907,900.00
5. 2. 3. 26. 03.	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas	752,000,000.00
5. 2. 3. 26. 04.	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang	260,000,000.00
5. 2. 3. 26. 08.	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian pelabuhan/tambatan perahu	9,572,187,500.00
5. 2. 3. 26. 09.	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung/tempat	25,624,748,520.00
5. 2. 3. 26. 10.	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bandar udara	50,441,029,500.00
5. 2. 3. 26. 11.	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian tugu batas/patok batas	282,000,000.00
5. 2. 3. 26. 12.	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan lainnya	57,222,365,000.00
5. 2. 3. 26. 13.	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian partisi ruangan	100,000,000.00
5. 2. 3. 27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	6,249,322,400.00
5. 2. 3. 27. 13.	Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan umum	6,101,322,400.00
5. 2. 3. 27. 21.	Belanja modal pengadaan buku peraturan perundang-undangan	52,000,000.00
5. 2. 3. 27. 25.	Belanja modal pengadaan peta/atlas/globe	96,000,000.00
5. 2. 3. 28.	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	250,000,000.00
5. 2. 3. 28. 01.	Belanja modal pengadaan lukisan/foto	150,000,000.00
5. 2. 3. 28. 06.	Belanja modal pengadaan maket/miniaturn/diorama	100,000,000.00
5. 2. 3. 32.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Lainnya	1,620,472,000.00
5. 2. 3. 32. 02.	Belanja modal pengadaan papan reklame/iklan	20,000,000.00
5. 2. 3. 32. 03.	Belanja modal pengadaan marka/rambu-rambu	1,353,472,000.00
5. 2. 3. 32. 04.	Belanja modal pengadaan alat ID Card	25,000,000.00
5. 2. 3. 32. 06.	Belanja modal pengadaan kasur	116,000,000.00
5. 2. 3. 32. 08.	Belanja modal pengadaan jaringan TV kabel	6,000,000.00
5. 2. 3. 32. 10.	Belanja modal pengadaan teralis	100,000,000.00
5. 2. 3. 33.	Belanja Modal BLUD	200,000,000.00
5. 2. 3. 33. 01.	Belanja modal BLUD	200,000,000.00
	Jumlah	1,366,100,000,000.00
	Surplus / (Defisit)	(100,000,000,000.00)
6.	PEMBIAYAAN	
6. 1.	Penerimaan Pembiayaan	100,000,000,000.00
6. 1. 1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	100,000,000,000.00
6. 1. 1. 04.	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	100,000,000,000.00
6. 1. 1. 04. 01.	Belanja pegawai dari belanja tidak langsung	27,353,260,109.00
6. 1. 1. 04. 03.	Belanja barang dan jasa	1,102,218,764.00
6. 1. 1. 04. 04.	Belanja modal	63,051,399,994.00
6. 1. 1. 04. 08.	Belanja bantuan sosial	8,493,121,133.00
	Jumlah	100,000,000,000.00
	Pembiayaan neto	100,000,000,000.00
	Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA/SIKPA)	0

Ranai, 5 Maret 2014

Bupati

ttd

ILYAS SABL I